

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

TAHUN 2018



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**
JL. Surohadikusumo No. 1 — Pemalang

© 2019

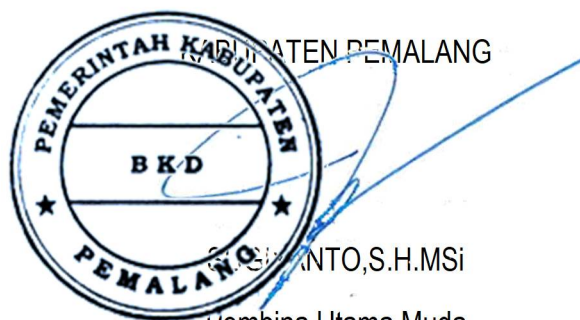
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 merupakan gambaran perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang selama Tahun 2018 yang disusun dan disampaikan secara sistematik.

Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, untuk itu telah diambil berbagai kebijakan guna mewujudkan sasaran yang akan dicapai. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang diukur kinerjanya dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya dalam beberapa indikator kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan ini.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



ANTO, S.H.MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19640712 199003 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 disusun sebagai bagian dari perwujudan pertanggungjawaban instansi Pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ini disusun sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dibuat untuk melengkapi Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka menciptakan good governance di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas.

Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam indikator kinerja utama (IKU) yang berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021.

Dalam menghitung capaian kinerja yang telah dilakukan atas indikator kinerja utama yang ada, di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang memiliki capaian kinerja rata-rata sebesar 124 %. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang khususnya dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang umumnya, yang selanjutnya mampu mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di semua lini.

Pada tahun 2018, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan 9 sasaran. Pencapaian ke 9 sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja 9 sasaran tersebut adalah sebesar 124. Secara rincian tingkat capaian kinerja seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pembangunan perencanaan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	-
2	Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal	100

3	Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung	100
4	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat	100
5	Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	118.3
6	Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur	247
7	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	104
8	Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier	198
		49
10	Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian	100

Dari seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif dalam mencapai sasaran. Namun masih ada capaian kinerja kegiatan yang masih kurang optimal (dibawah 85%), dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat realisasi anggaran 84,38% .Efisiensi anggaran karena sudah ada pengiriman surat secara elektronik.
2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 76,62% karena Efisiensi kebutuhan bahan bacaan.
3. Pengadaan lemari besi dan feling cabinet (78,16%), silpa pengadaan.
4. Pemindehan tugas PNS
Pada tahun 2018, kegiatan pemindehan tugas PNS realisasi anggarannya sebesar 78,14 % dikarenakan efisiensi anggaran target kinerja telah terlampaui, dari jumlah target Surat Perintah Tugas untuk mutasi antar OPD /unit kerja sebanyak 500 SPT terealisasi 884 Surat Perintah Tugas mutasi keluar/masuk.
5. Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS terealisasi sebesar 72,38%karena pola pelatihannya adalah pengiriman peserta ke lembaga diklat sehingga banyak sedikitnya peserta diklat peserta tergantung dari lembaga penyelenggara pelatihan sedangkan pada tahun 2018 panggilan dari lembaga penyelenggara pelatihan sedikit;
6. Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah realisasi anggaran 80,71%, Kegiatan yang diselenggarakan untuk jabatan fungsional tertentu di luar fungsional guru sehingga terbatas sekali jumlah diklatnya.
7. Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah realisasi anggaran 81,63% , Peserta UKPPI dan Ujian Dinas hanya terealisasi 71 orang dari target 120 orang.
8. Seleksi penerimaan ASN
Realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2018 sebesar 75,01% dikarenakan :
 - Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menganggarkan fasilitas tersendiri bagi peserta seleksi CPNS untuk pelaksanaan SKD dan SKB, akan tetapi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggabungkan biaya fasilitas SKD dan SKB sehingga anggaran tidak terserap;
 - Jumlah peserta melaksanakan seleksi CPNS tidak memenuhi target;
9. Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
Realisasi Penyerapan sebesar 60,40% dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi pada tataran Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sebagai implementasi Permendagri dimaksud diundangkan 15 (lima belas) Peraturan Bupati Pemalang tentang UPTD yang terbit menjelang akhir tahun anggaran 2018, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengisian jabatan dan pelantikan. Pelaksanaan kegiatan pelantikan sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

- 10.** Pengangkatan CPNS menjadi PNS.
Realisasi penyerapan anggaran sebesar 8,05% dikarenakan proses administrasi CPNS sebagai PNS masih dilakukan sehingga kegiatan pengangkatan belum bisa dilaksanakan pada tahun 2018.
- 11.** Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana.
Realisasi penyerapan anggaran 47,37 % dikarenakan dari target yang ditetapkan sebanyak 2 kali dilaksanakan 1 kali karena jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut berbarengan dengan pelaksanaan seleksi CPNS.
- 12.** Perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN), realisasi anggaran 84,22%. Sedikitnya ASN yang mengalami kecelakaan kerja

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4. Sumber Daya Manusia	4
1.5. Sarana dan Prasarana	4
1.6. Sumber Daya Keuangan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	11
2.3. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2. Evaluasi Kinerja	16
3.3. Akuntabilitas Keuangan	20
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu bentuk dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumberdaya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (*input oriented*) menjadi orientasi pada hasil (*result oriented*) serta dapat dipertanggungjawabkan.

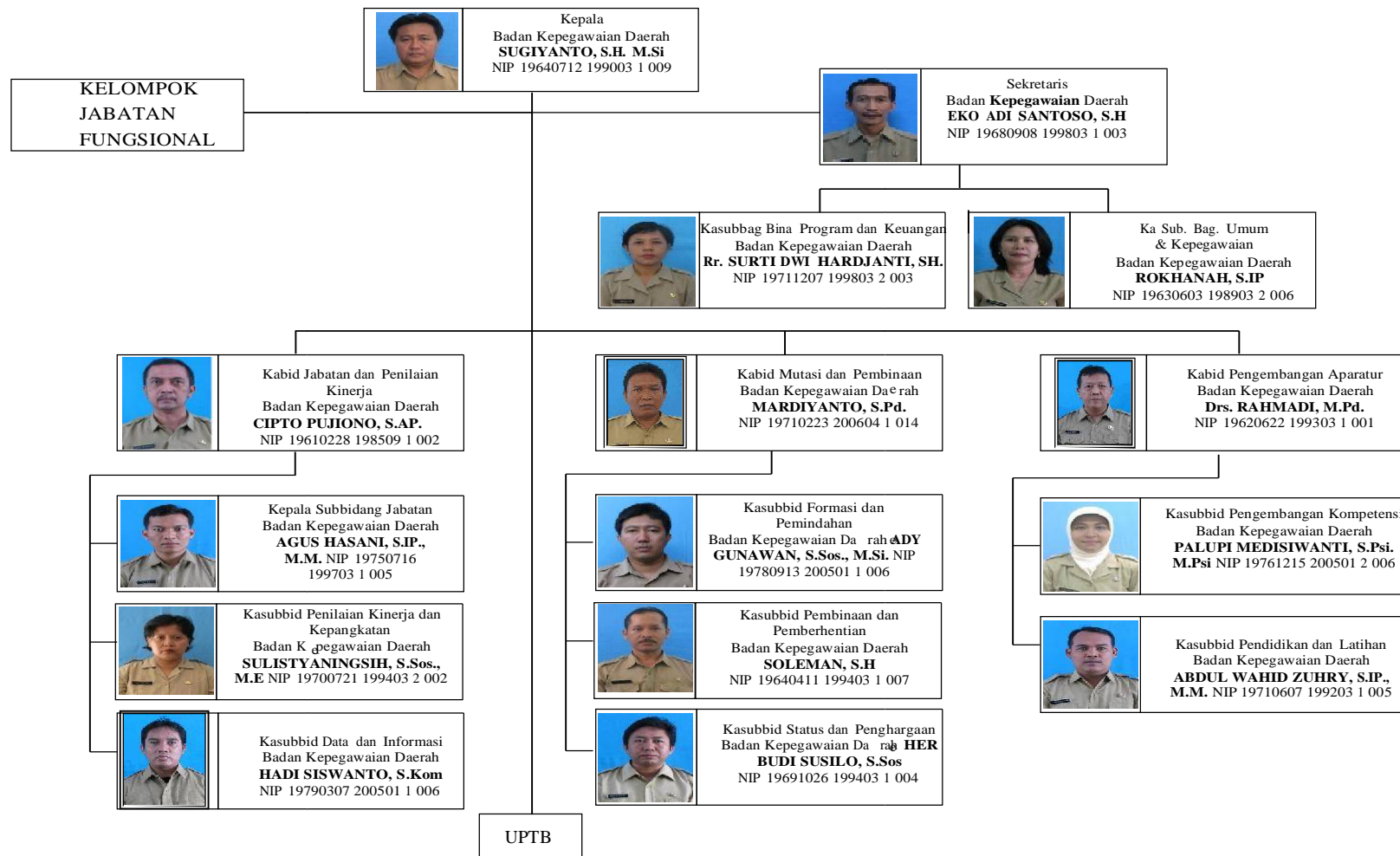
Laporan ini memuat sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

1.2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang merupakan :

1. unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten
3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;;
 - c. Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Jabatan;
 2. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kepangkatan;
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Mutasi dan Pembinaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pemindahan;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai;
 3. Subbidang Status dan Penghargaan
 - e. Bidang Pengembangan Aparatur, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengembangan Kompetensi;
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. UPTB;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG



1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;.
- e. pembinaan terhadap UPTB BKD;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang hingga akhir Desember 2018 memiliki pegawai sebanyak 65 orang dengan komposisi sebagai berikut :

1. Komposisi Menurut Golongan :

- Golongan IV	:	9	orang
- Golongan III	:	41	orang
- Golongan II	:	14	orang
- Golongan I	:	1	orang

2. Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan :

- Pasca Sarjana	:	14	orang
- Sarjana	:	24	orang
- D 4	:	2	orang
- Sarjana Muda/Diploma 3	:	2	orang
- SLTA	:	20	orang
- SLTP	:	3	orang
- SD	:	-	orang

1.5. Sarana dan Prasarana

Guna kelancaran layanan kepegawaian dan penyelesaian pekerjaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang, selain sumber daya aparatur yang tersedia yang dikerahkan secara maksimal, perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tercapainya tujuan.

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang hingga saat ini sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
	A. TANAH	-	-	-	Tanah ikut ke Aset Setda.
	B. PERALATAN DAN MESIN				
1	Station Wagon	8	6	1	
2	Sepeda Motor	28	22	3	
3	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	4	2	2	
4	Lemari Besi	16	9	7	
5	Rak Besi/Metal	1	1	-	
6	Rak Kayu	2	1	1	
7	Filling Besi/Metal	26	26	-	
8	Rotary Filling	22	22	-	
9	Lemari kayu	1	1	-	
10	Alat Penghancur Kertas	5	5	-	
11	Papan Pengumuman	2	2	-	
12	White Board	3	3	-	
13	Mesin absensi	1	1	-	
14	Overhead Projektor	5	2	-	
15	Meja Rapat	14	14	-	
16	Meja Podium	1	1	-	
17	Meja Reseptionis	1	1	-	
18	Meja Sekolah	95	95	-	
19	Kursi Rapat	195	195	-	
20	Kursi Tamu	4	4	-	
21	Kursi Putar	3	1	2	
22	Kursi Lipat	3	3	-	
23	Bangu Tunggu	2	2	-	
24	Meja Komputer	19	16	3	
25	Kasur	1	1	-	
26	Tikar	2	2	-	
27	Jam Elektronik	2	2	-	
28	Mesin Penghisap Debu	1	1	-	
29	Lemari Es	1	1	-	
30	AC Split	24	24	-	
32	Kipas Angin	13	13	-	
33	Alat Dapur Lainnya	15	15	-	
34	Televisi	3	3	-	
35	Sound System	2	2	-	
36	Wireless	4	3	1	
37	Unit Power Supply	1	1	-	
38	Lambang Garuda Pancasila	1	1	-	
39	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	1	-	
40	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	1	-	
41	Kaca Hias	1	1	-	
42	Dispenser	3	3	-	
40	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2	-	
41	Alat Pemadam Portable	1	1	-	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
42	P.C Unit	54	54	-	
43	Note Book dan laptop	37	37	-	
44	CPU	15	15	-	
45	Monitor	29	29	-	
46	Printer	39	39	-	
47	Scanner	5	5	-	
48	Server	5	5	-	
49	Router	3	3	-	
50	Hub	4	4	-	
51	Peralatan Jaringan Lain-lain	6	2	-	
52	Tripod LCD	0	0	-	
53	Mesin Absensi	1	1	-	
54	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	-	
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	-	
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	53	53	-	
58	Meja Tamu Ruangan Biasa	4	4	-	
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	-	
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	9	-	
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	12	-	
62	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	8	-	
63	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	1	-	
64	Lemari Buku untuk Perpustakaan	5	5	-	
65	Camera + Attachment	3	3	-	
66	Proyektor + Attachment	5	5	-	
67	Audio Amplifier	2	2	-	
68	Disc. Record Player	2	2	-	
69	Microphone/Wireless Mic	3	3	-	
70	Microphone Connector Box	1	1	-	
71	Audio Master Control Unit	1	1	-	
72	Recalver HF/LF	1	1	-	
73	Digital Audio Storage System	4	4	-	
74	Peralatan studio Visual Lain-lain	2	2	-	
75	Tripod Camera	4	4	-	
76	Slide Projector	3	3	-	
77	Layar Film	8	8	-	
78	Amplifier	2	2	-	
79	Loudspeaker	4	4	-	
80	Pesawat Telephone	1	1	-	
81	Facsimile	2	2	-	
82	Tensi Meter	1	1	-	
83	Alat Kedokteran Umum Lain Lain	7	7	-	
84	Buku Umum Lain-lain	102	102	-	
85	Peta Wilayah	2	2	-	
86	Alat Olah Raga Lainnya	2	2	-	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		Keterangan
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6
87.	Mesin Fotocopy	1	1	-	
88.	Tablet	2	2	-	
89.	Laminating	1	1	-	
90.	Cancoder	1	1	-	
91.	Rak server	1	1	-	
C. BANGUNAN DAN GEDUNG					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	-	
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	-	
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	1	-	
4	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	-	
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1	-	

1.6. Sumber Daya Keuangan

Guna menunjang segala operasional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang diperlukan dukungan keuangan yang memadai agar pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keseluruhan dukungan keuangan guna pembiayaan operasional BKD Kabupaten Pemalang baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang.

Dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan 1 urusan, 9 program dengan 63 kegiatan. Adapun jumlah dana yang dialokasikan untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 untuk :

- belanja tidak langsung Rp. 4.659.907.000,00
 - belanja langsung Rp. 9.194.082.000,00
-
- Jumlah alokasi anggaran Rp. 13.853.989.000,00

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tidak terdapat target pendapatan, sehingga BKD murni sebagai pengguna anggaran dengan besar pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam APBD 2018 yaitu Rp 13.853.989.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sesuai pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Sehingga dalam Rencana Strategis ini memuat antara lain gambaran pelayanan OPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mana Indikator kinerja SKPD mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk 5 (lima) tahun mendatang.

2.1.1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan organisasi / lembaga yang harus mampu :

- Menarik, komitmen dan menggerakkan orang;
- Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;
- Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan (yang akan datang).

Sesuai dengan pasal 272 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Jadi visi

Maka visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang mengacu pada visi Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yaitu **"TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA."**

2.1.2. Misi

Misi merupakan langkah-langkah yang dijabarkan lebih lanjut kedalam tindakan, yang mencerminkan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh organisasi berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi daerah maupun organisasi itu sendiri.

Adapun misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang juga mengacu pada misi RPJMD Kabupaten Pemalang yaitu :selaras dengan misi ke 3 Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang.

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan misi ke 6 dari RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah yang diwujudkan dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik dan sasarannya adalah meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka meningkatkan tata kelola yang baik juga diperlukan kualitas pelayanan terhadap produk-produk bidang kepegawaian.

2.1.3. Tujuan

Selaras dengan misi yang tertuang dalam pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang 2016 – 2021 maka tujuan yang dirumuskan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah selama kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
3. Mewujudkan kesejahteraan sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur.
5. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier.
6. Terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu menyajikan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini.

2.1.4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut, perlu dijabarkan ke dalam sasaran yang spesifik, terukur, menantang namun dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil serta memiliki batas waktu untuk mencapainya. Guna mewujudkannya Badan Kepegawaian Daerah menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal.
2. Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung.
3. Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat.
4. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
5. Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur.
6. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.
7. Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier.
8. Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian.

2.1.5. Program

Guna mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan dan sasaran secara tepat dan akurat, diperlukan program yang realistis untuk dapat dilaksanakan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu pada belanja langsung yang terbagi dalam dua jenis program yaitu : *Program SKPD* dan *Program yang menjadi urusan wajib* yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Program yang dimaksud adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
9. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
10. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian
11. Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD.

Perencanaan kinerja amat penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menjadi acuan bagi manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanatkan.

Rencana kinerja akan berguna apabila dimanfaatkan untuk proses manajemen dalam mencapai hasil yang diinginkan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin saja masih bersifat subyektif dan kurang realistis, namun penetapan rencana kinerja ini masih juga bermanfaat untuk mengukur kemampuan pencapaian target yang diinginkan sendiri oleh manajemen.

Sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan terwujud pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Pertama :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	Nilai LKJIP	B

Sasaran Kedua :

Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal;

No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan

Sasaran ketiga :

Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung;

No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	12 bulan

Sasaran keempat:

Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat

No	Indikator Kinerja	Target
1	2	
	Prosentase dokumen dan laporan yang terselesaikan dengan baik	80 %

Sasaran kelima :

Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur

No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	Prosentase jumlah/frekwensi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	19,46 %

Sasaran Keenam :

Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur

No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	Prosentase pemenuhan layanan untuk sumber daya aparatur	40,83 %

Sasaran Ketujuh :

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	Prosentase ASN yang mengikuti diklat	5.01%

Sasaran kedelapan:

Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier

No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	Prosentase ASN yang dilakukan penataan Prosentase ASN yang mengikuti Assesment (Uji Kompetensi) sebagai bahan pertimbangan Tim Baperjabat	4,38% 16,70 %

Sasaran Kesembilan :

Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian

No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	Prosentase pembangunan/pengembangan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%

2.3. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Hal ini tersirat dalam Perjanjian Kinerja yang bertujuan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
5. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
6. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
7. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
8. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)/sanksi.

Lebih lanjut Pernyataan Perjanjian Kinerja Tingkat SKPD sebagaimana pada lampiran 2 dan lampiran 3.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) yang merupakan gambaran mengenai kinerja yang diinginkan. Skala pengukuran kinerja setiap indikator dalam laporan kinerja ini dikategorikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75 %	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian kinerja sasaran adalah 124 %. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Capaian Pelaksanaan (%)		
	Target	Realisasi fisik	%
1	3	4	5
Meningkatnya kualitas pembangunan perencanaan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	CC		
Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal	12 bulan	12 bulan	100
Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung	12 bulan	12 bulan	100
Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat	60%	60%	100
Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	18,54%	21,94%	118.3
Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur	40,50%	100,18	247
Meningkatnya kapasitas sumber daya	3,62%	3,77%	104

Sasaran Strategis	Capaian Pelaksanaan (%)		
	Target	Realisasi fisik	%
1	3	4	5
aparatur			
Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier	4,18% 13,87%	8,3% 6,8%	198 49
Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian	60%	60%	100
JUMLAH			124

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Dalam tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah menetapkan 9 sasaran yang ingin dicapai / diwujudkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, pencapaian sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran pada Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran pertama :

Meningkatnya kualitas pembangunan perencanaan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	
		Target	Realisasi
1.	Nilai LKJIP	CC	

Pada tahun 2018 tidak dilakukan evaluasi terhadap LKJIP Badan Kepegawaian Daerah sehingga tidak diketahui nilai atau skor dari LKJIP.

Sasaran kedua:

Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal

		Tahun 2018	

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Terpenuhinya kebutuhan administrasi setiap bulan	12 bulan	12 bulan	100

Untuk sasaran terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal terdiri dari kegiatan yang sifatnya merupakan pemenuhan kebutuhan rutin yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/ 12 bulan terdiri dari 14 kegiatan dan dapat terealisasi seluruhnya.

Sasaran tiga

Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018		%
		Target	Realisasi	
1.	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan	12 bulan	100

Dalam rangka mencapai sasaran ketiga terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung, dilaksanakan 4 kegiatan merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin sekretariat. Semua target pada sasaran ketiga pada tahun 2018 telah tercapai 100%

Sasaran keempat :

Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018		%
		Target	Realisasi	
1.	Prosentase dokumen dan laporan yang terselesaikan dengan baik	60 %	60%	100

Dalam rangka mencapai sasaran keempat terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat dilaksanakan 5 kegiatan. Semua target pada sasaran keempat pada tahun 2018 telah tercapai 100%

Sebagaimana tahun sebelumnya, semua target pada sasaran keempat pada tahun 2018 tercapai.

Sasaran Kelima:

Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018		%
		Target	Realisasi	
1.	Prosentase jumlah/frekwensi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	18,54%	21,94%	

Dalam rangka mencapai sasaran kelima meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur terdapat 1 (satu) indikator yaitu prosentase jumlah/frekwensi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya

aparatur yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah Aparatur Sipil Negara. Indikator tersebut dapat dilaksanakan melalui 4 kegiatan. Dari 4 kegiatan tersebut jumlah pembinaan yang dilakukan sebanyak 2.220 Aparatur sipil Negara terealisasi sebanyak 2.250 Aparatur Sipil Negara dari jumlah ASN sebanyak 10.251 orang. Prosentase ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari jumlah satker yang dilakukan pembinaan sebanyak 60 dengan jumlah pegawai sebanyak 2.209 orang. Untuk tingkat pelanggaran yang terselesaikan sebanyak kasus 12 dan penerbitan Ijin perceraian untuk 29 orang/surat ijin.

Sasaran keenam :

Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018		%
		Target	Realisasi	
1.	Prosentase pemenuhan layanan untuk sumber daya aparatur	40,50%	100,18	247

Dalam rangka mencapai sasaran keenam meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur terdapat 1 (satu) indikator yaitu prosentase pemenuhan layanan untuk sumber daya aparatur. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah layanan kepegawaian yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah dibandingkan dengan jumlah Aparatur Sipil Negara. Indikator tersebut dapat dilaksanakan melalui 4 kegiatan. Dari jumlah target layanan kepegawaian tahun 2018 sebanyak 4.850 produk layanan terealisasi sebanyak 10.270 produk layanan yang terdiri dari 53 karpeg, 166 karis/Krsu, 7.000 LP2P, 45 taspen, 150 satyalencana, 965 pelayanan terintegrasi, 1.359 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS. Secara umum untuk sasaran keenam meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur telah terealisasi melebihi target.

Sasaran ketujuh :

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018		%
		Target	Realisasi	
1.	Prosentase ASN yang mengikuti diklat	3,62%	3,77%	104

Dalam rangka mencapai sasaran ketujuh meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur terdapat 1 (satu) indikator yaitu prosentase ASN yang mengikuti diklat. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat dibandingkan dengan jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka mencapai sasaran ketujuh Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dilaksanakan 8 kegiatan. dari jumlah target sebesar 433 orang terealisasi sebanyak 387 orang yang terdiri dari kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk para calon PNS sebanyak 6 orang, Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan bagi pejabat struktural terealisasi sebanyak 24 orang, Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi bagi PNS terealisasi sebanyak 88 orang, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS terealisasi sebanyak 37 orang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS sebanyak 112 orang, kegiatan, Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah sebanyak 80 orang, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS terealisasi sebanyak 40 orang, Secara umum sasaran ketujuh meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur telah terealisasi dengan baik.

Sasaran kedelapan :

Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/ sistem karier

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018		%
		Target	Realisasi	
1.	Prosentase ASN yang dilakukan penataan	4,18%	8,3%	198
2.	Prosentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Assesment (Uji Kompetensi) sebagai bahan pertimbangan tim Baperjkat	13,87%	6,8%	49

Dalam rangka mencapai sasaran kedelapan terwujudnya sumber daya paratur yang professional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/system karier terdapat 2(satu) indikator yaitu prosentase ASN yang dilakukan penataan dan prosentase ASN yang mengikuti Assesment (Uji kompetensi) sebagai bahan pertimbangan tim Baperjkat . Indikator prosentase ASN yang dilakukan penataan diperoleh dengan membandingkan antara jumlah Aparatur Sipil Negara yang dimutasi dibandingkan dengan jumlah ASN. Pada tahun 2018 jumlah ASN yang dimutasi sebanyak 864 ASN (8,3%). Sedangkan untuk indikator prosentase ASN yang mengikuti Assesment (Uji kompetensi) sebagai bahan pertimbangan tim Baperjkat dihitung dengan membandngkan antara jumlah ASN yang mengikuti assessment di banding dengan jumlah ASN yang memenuhi syarat jabatan. Untuk jumlah ASN yang mengikuti Assesment pada tahun 2018 sebanyak 75 orang disbanding jumlah ASN yang memenuhi syarat jabatan sebanyak 1.094 ASN (6,8%). Secara umum sasaran kedelapan terwujudnya sumber daya paratur yang professional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/system karier telah terealisasi dengan baik.

Sasaran kesembilan:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018		%
		Target	Realisasi	
1.	Prosentase pembangunan/pengembangan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi	60%	60%	100

Dalam rangka mencapai sasaran kesembilan terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian ditetapkan 1 (satu) indikator yaitu Prosentase pembangunan/pengembangan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi.

Guna memperlancar pengelolaan data base kepegawaian yang merupakan sumber informasi dari seluruh layanan kepegawaian maka kegunaan perangkat dan aplikasi system informasi sangatlah dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) tidak hanya menangani pengelolaan data base yang bersifat elektronik saja namun beberapa layanan juga ikut tertangani, antara lain :

- Pengelolaan arsip PNS dan CPNS
- Pengelolaan data tenaga honorer
- Pengelolaan profil kepegawaian, dll

Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang, banyak aplikasi-aplikasi/sistem informasi selain Simpeg yaitu

- Aplikasi E-filing;
- Aplikasi Sipinter (Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi);
- Aplikasi Simanja (Sistem Informasi Manajemen Kinerja);
- Aplikasi Sirepa (Sistem Informasi Perencanaan Pegawai);
- Aplikasi Sidak (Sistem Informasi Diklat dan Analisa Kebutuhan)

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Pada APBD Tahun Anggaran 2018 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp 13.853.989,-:

- **Belanja Tidak Langsung**

Keseluruhan belanja tidak langsung teralokasi pada belanja gaji pegawai yang bersifat tetap sebesar Rp. 4.659.907.000,-,- terserap Rp.4.531.862.224,- atau 97,25 %.

- **Belanja Langsung**

Seluruh belanja langsung teralokasi pada pemenuhan operasional program dan kegiatan, yang sepenuhnya merupakan pendukung pencapaian target visi dan misi organisasi maupun pemerintah daerah.

Jumlah belanja Langsung tahun 2018 sebesar Rp. 9.194.082.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.233.021.692,- yang dialokasikan untuk :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.666.828.500,- terserap Rp. atau %.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.7.065.621.500,- terserap Rp. atau %.
- Belanja Modal sebesar Rp. 461.632.000,- terserap Rp. atau %

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 9 Program yang dilaksanakan dalam 63 Kegiatan.

- Untuk rencana dan realisasi penggunaan anggaran sesuai Indikator Kinerja Utama dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Target	Real	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan perencanaan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	17.050.000	16.789.000	98,47
2.	Terwujudnya tertib administrasi dan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	35.000.000	29.533.250,-	84,38

	manajemen kepegawaian yang handal					
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.000.000	86.947.003	86,95
			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	57.000.000	53.858.500	94,49
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	43.250.000	40.331.047	93,25
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.836.000	45.484.000	99,23
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.400.000	39.155.150	96,92
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	24.980.000	99,92
			Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000	39.845.800	99,61
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.709.000	36.568.650	99,62
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	34.010.000	31.477.500	92,55
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	198.450.000	190.485.000	95,99
			Penyediaan peralatan rumah tangga	36.500.000	36.487.000	99,96
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.000.000	16.090.500	76,62
			Penyediaan makanan dan minuman	86.000.000	80.547.900	93,66
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	504.450.000	503.376.629	99,79
3	Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	93.850.000	87.139.000	92,85
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.350.000	24.090.000	95,03
			Pengadaan Mebeleur	25.850.000	22.055.000	85,32
			Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	96.132.000	91.825.000	95,52
			Pengadaan Lemari Besi dan feeling kabinet	17.500.000	13.677.600	78,16
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	78.000.000	77.965.000	99,96

			Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan operasional	96.000.000	95.983.355	99,98
			Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	23.500.000	23.473.000	99,89
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000	9.960.000	99,60
			Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	25.200.000	25.165.250	99,86
4	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	10.000.000	9.840.000	98,40
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000	9.939.000	99,39
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	147.897.500	146.995.000	99,39
		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	61.500.000	59.374.500	96,54
5	Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	144.270.000	128.787.400	89,27
			Pembinaan, Monitoring dan evaluasi disiplin aparatur	153.395.000	130.740.626	85,23
			Penyelesaian izin perceraian bagi PNS	52.000.000	49.007.000	94,24
			Pengelolaan Penilaian Kinerja bagi PNS	141.780.000	135.955.500	95,89
		Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	204.099.000	201.218.000	98,59

6	Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur	Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	Fasilitasi & Kelengkapan Urusan Kepegawaian	164.688.600	158.076.727	95,99
			Pemberian penghargaan bagi PNS	46.028.400	43.314.000	94,10
			Fasilitasi Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara	55.162.500	47.792.000	86,64
			Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	68.361.500	64.312.454	94,08
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	31.754.500	27.232.500	85,76
			Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan bagi pejabat struktural	781.959.000	766.006.812	97,96
			Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi bagi PNS	424.278.500	400.007.501	94,28
			Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	211.623.750	153.182.513	72,38
			Seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS	715.005.000	687.480.839	96,15
			Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah	237.242.500	205.127.750	86,46
			Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS	312.854.800	308.569.800	98,63
			Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah	333.818.200	269.428.042	80,71
			Fasilitasi ujian dinas dan ujian kenaikan penyesuaian ijazah	62.730.000	51.206.300	81,63
8	Terwujudnya sumberdaya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kompetensi dan sistem karier	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Pelaksanaan kegiatan Seleksi dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Pengawas	335.830.000	306.052.927	91,13

			Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan jabatan fungsional tertentu	76.360.000	69.956.500	91,61
			Penyusunan formasi ASN	134.887.000	122.866.500	91,09
			Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah	157.090.000	94.881.500	60,40
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	240.624.000	210.020.490	87,28
			Pengangkatan CPNS menjadi PNS	96.620.000	7.775.000	8,05
			Penyelesaian proses pensiun PNS	143.020.000	137.221.500	95,95
			Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana	92.695.000	43.905.500	47,37
			Perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN)	54.240.000	45.681.704	84,22
			Seleksi penerimaan calon PNS	874.908.000	656.270.807	75,01
			Penyusunan database karir ASN	173.733.750	153.223.603	88,19
		Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Pemindahan tugas PNS	109.563.000	85.611.750	78,14
9.	Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Pembangunan/pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah	406.475.000	399.640.000	98,32

- Rencana dan realisasi penggunaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	35.000.000	29.533.250,-	84,38
		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.000.000	86.947.003	86,95
		3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	57.000.000	53.858.500	94,49
		4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	43.250.000	40.331.047	93,25
		5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.836.000	45.484.000	99,23
		5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.400.000	39.155.150	96,92
		6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	24.980.000	99,92
		7 Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000	39.845.800	99,61
		8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.709.000	36.568.650	99,62
		9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	34.010.000	31.477.500	92,55
		10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	198.450.000	190.485.000	95,99
		11 Penyediaan peralatan rumah tangga	36.500.000	36.487.000	99,96
		12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.000.000	16.090.500	76,62
		13 Penyediaan makanan dan minuman	86.000.000	80.547.900	93,66
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	504.450.000	503.376.629	99,79		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	93.850.000	87.139.000	92,85
		2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.350.000	24.090.000	95,03

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)			
			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	
		3	Pengadaan Mebeleur	25.850.000	22.055.000	85,32
		4	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	96.132.000	91.825.000	95,52
		5	Pengadaan Lemari Besi dan feeling kabinet	17.500.000	13.677.600	78,16
		6	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	78.000.000	77.965.000	99,96
		7	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan operasional	96.000.000	95.983.355	99,98
		8	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	23.500.000	23.473.000	99,89
		9	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000	9.960.000	99,60
		10	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	25.200.000	25.165.250	99,86
3	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	1	Pemindahan tugas PNS	83.027.900	63.434.925	76,40
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	71.314.240	95,09
		2	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	65.100.000	61.294.000	94,15
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	17.050.000	16.789.000	98,47
		2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	10.000.000	9.840.000	98,40
		3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000	9.939.000	99,39
		4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	147.897.500	146.995.000	99,39
5	Program peningkatan perencanaan	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	61.500.000	59.374.500	96,54

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
	dan penganggaran SKPD				
6	Program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	31.754.500	27.232.500	85,76
		2 Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan bagi pejabat struktural	781.959.000	766.006.812	97,96
		3 Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi bagi PNS	424.278.500	400.007.501	94,28
		4 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	211.623.750	153.182.513	72,38
		5 Seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS	715.005.000	687.480.839	96,15
		6 Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah	237.242.500	205.127.750	86,46
		7 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS	312.854.800	308.569.800	98,63
		Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah	333.818.200	269.428.042	80,71
		Fasilitasi ujian dinas dan ujian kenaikan penyesuaian ijazah	62.730.000	51.206.300	81,63
	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	1 Pelaksanaan kegiatan Seleksi dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Pengawas	335.830.000	306.052.927	91,13
		2 Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan jabatan fungsional tertentu	76.360.000	69.956.500	91,61
		3 Penyusunan formasi ASN	134.887.000	122.866.500	91,09

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
		4 Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah	157.090.000	94.881.500	60,40
		5 Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	240.624.000	210.020.490	87,28
		6 Pengangkatan CPNS menjadi PNS	96.620.000	7.775.000	8,05
		7 Penyelesaian proses pensiun PNS	143.020.000	137.221.500	95,95
		8 Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana	92.695.000	43.905.500	47,37
		9 Perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN)	54.240.000	45.681.704	84,22
		10 Seleksi penerimaan calon PNS	874.908.000	656.270.807	75,01
		11 Penyusunan database karir ASN	173.733.750	153.223.603	88,19
		12 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	204.099.000	201.218.000	98,59
	Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	1 Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	144.270.000	128.787.400	89,27
		2 Pembinaan, Monitoring dan evaluasi disiplin aparatur	153.395.000	130.740.626	85,23
		3 Penyelesaian izin perceraian bagi PNS	52.000.000	49.007.000	94,24
		4 Fasilitasi & Kelengkapan Urusan Kepegawaian	164.688.600	158.076.727	95,99
		5 Pemberian penghargaan bagi PNS	46.028.400	43.314.000	94,10
		6 Fasilitasi Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara	55.162.500	47.792.000	86,64
		7 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	68.361.500	64.312.454	94,08
		8 Pengelolaan Penilaian Kinerja bagi PNS	141.780.000	135.955.500	95,89
Belanja Langsung			9.194.082.000	8.233.021.692	89,55
Belanja Tidak Langsung			4.659.907.000	4.531.862.224	97,25
Belanja Total			13.853.989.000	12.764.883.916	92,14

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 pada umumnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak
- b. Dalam tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 yang menguraikan keberhasilan/kegagalan yang dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan 9 sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari ke 9 (Sembilan) sasaran adalah sebesar 124 %. Secara umum kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dapat dikategorikan **sangat baik**.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pemerintah Kabupaten Pemalang



SUGIANTO, S.H.MSi
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
NIP. 19640712 199003 1 009